

PELAPORAN TERINTEGRASI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN ANALISIS LONGITUDINAL

Asri Pangestika Lutfiani¹, Musfirah Majid², Herna Rizaldi³

¹Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan,

^{2,3} Program Studi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

Korespondensi email: asri.lutfiani@gmail.com

Diterima : 31 Oktober 2025, Direvisi : 25 Novemberr 2025, Disetujui : 30
Desember 2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan pelaporan terintegrasi (Integrated Reporting Disclosure/IRD) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menggunakan analisis longitudinal periode 2020–2024. Mengacu pada teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan, penelitian ini menilai pengaruh profitabilitas, leverage, jaminan pihak ketiga, serta perlindungan investor terhadap IRD dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan adopsi pedoman GRI sebagai variabel kontrol. Sampel terdiri dari BUMN yang konsisten menerbitkan laporan terintegrasi, dengan penilaian tingkat pengungkapan dilakukan melalui analisis konten, dan pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel dengan uji Hausman dikarenakan lebih sesuai dengan model efek tetap untuk riset ini. Total sampel penelitian sebanyak 90. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan pihak ketiga dan perlindungan investor berpengaruh positif dan signifikan terhadap IRD, sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, adopsi GRI meningkatkan tingkat pengungkapan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap IRD. Temuan ini menegaskan pentingnya legitimasi publik, transparansi, serta akuntabilitas dalam praktik pelaporan terintegrasi BUMN di Indonesia.

Kata kunci: BUMN, pelaporan terintegrasi, analisis longitudinal, pemangku kepentingan, legitimasi

INTEGRATED REPORTING BY STATE-OWNED ENTERPRISES IN INDONESIA BASED ON A LONGITUDINAL ANALYSIS

Abstract

This study aims to examine the determinants of Integrated Reporting Disclosure (IRD) among Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) using a longitudinal analysis covering the period 2020–2024. Based on legitimacy and stakeholder theories, the research evaluates the effects of profitability, leverage, third-party assurance, and investor protection on IRD, while including firm size and GRI adoption as control variables. The sample consists of SOEs consistently publishing integrated reports, with disclosure levels measured through content analysis and hypotheses tested using panel data regression with a Hausman test, which indicated that the fixed-effects model was more appropriate for this study. The total research sample comprised 90 observations. The findings reveal that third-party assurance and investor protection positively and significantly influence IRD, whereas profitability and leverage show no significant effect. Moreover, GRI adoption enhances disclosure levels, while firm size is

negatively associated with IRD. These results highlight the importance of public legitimacy, transparency, and accountability in shaping integrated reporting practices among SOEs in Indonesia.

Keywords: *State-owned enterprises, integrated reporting, longitudinal analysis, stakeholder, legitimacy*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep tanggungjawab sosial perusahaan dan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan nilai dan sebagai faktor pendorong bagi perekonomian dunia (Public Policy Options to Scale and Accelerate Business Action towards Vision 2050, 2012; UNIDO Annual Report 2012, 2013). Konsep tersebut telah dimasukkan ke dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dirilis oleh PBB pada tahun 2015 dengan menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan 169 target sebagai kerangka komprehensif untuk menangani berbagai aspek pembangunan berkelanjutan (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015). Sesuai dengan agenda tersebut, organisasi swasta hingga publik diminta untuk berfokus pada keberlanjutan yang terintegrasi dalam operasi dan strategi bisnis mereka serta melaporkan kemajuannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pelaporan terintegrasi (IR) (Fonseca & Carvalho, 2019). Pelaporan terintegrasi menjadi penting sebagai langkah evolusioner dalam pelaporan organisasi, karena menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan ke dalam satu dokumen untuk pelaporan keberlanjutan (Beck et al., 2017; Lai et al., 2018; Stacchezzini et al., 2019). Baik entitas swasta maupun publik, secara bertahap telah mengubah fokus pelaporan mereka dari laporan yang hanya berfokus pada informasi keuangan, menjadi laporan yang lebih komprehensif, termasuk sosial, lingkungan hidup, keberlanjutan, dan segala aspek untuk memenuhi kebutuhan banyak pemangku kepentingan (Biondi & Bracci, 2018; Dumay et al., 2010). Meskipun IR seringkali digunakan oleh entitas sektor swasta, relevansi IR telah dibahas dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Farneti et al., 2019; Nicolò et al., 2020).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan laporan sukarela yaitu meneliti tentang kinerja ESG terhadap biaya modal dan investasi pengembangan dan penelitian (A. P. Lutfiani & Hidayah, 2022) yang hanya berfokus pada laporan non keuangan saja tanpa memperhatikan laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian yang membahas tentang pelaporan terintegrasi terhadap relevansi nilai (A. Lutfiani et al., 2024) tidak mempertimbangkan aspek pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini melengkapi dua kekurangan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BUMN memainkan peran utama di sektor publik sebagai organisasi yang diatur secara politik dan menggabungkan kepemilikan publik dan kepemilikan swasta yang tujuan utamanya adalah menyediakan layanan serta barang publik untuk kepentingan ekonomi dan sosial serta mempertahankan sikap yang berorientasi pasar (Argento et al., 2019). BUMN menjadi sasaran pengawasan publik secara besar-besaran oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BUMN diharapkan memainkan peran penting dalam pelaporan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan legitimasi (Andrades & Larran-Jorge, 2019). Seperti yang diketahui, IR menggabungkan informasi keuangan non-keuangan, sehingga menjadi alat yang cocok

bagi BUMN untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan demi kepentingan penyedia modal dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi pemangku kepentingan yang teraktik pada dimensi non keuangan yang mengarah pada penciptaan nilai publik (Tirado-Valencia et al., 2019).

Penelitian ini berfokus pada teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan yang mengasumsikan bahwa IR menghubungkan berbagai informasi untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Teori legitimasi menekankan pada analisis nilai, prinsip, dan harapan masyarakat luas yang dibangun antara organisasi dan komunitas sosialnya. Sedangkan teori pemangku kepentingan berfokus pada kebutuhan informasi dan kelompok pemangku kepentingan tertentu sesuai dengan kekuatan strategis mereka dan tingkat pengaruh yang diberikan pada organisasi (Garde-Sanchez et al., 2017). Kedua teori ini mempunyai relevansi khusus dalam menjelaskan perilaku BUMN, karena organisasi ini mengejar legitimasi sosial atas kegiatan operasi mereka untuk memenuhi kebutuhan publik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (Garde-Sanchez et al., 2017).

Dalam konteks BUMN, teori legitimasi menekankan pada keberagaman pemangku kepentingan yang mana masing-masing memiliki pengaruh politik dan sosial untuk menuntut keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, untuk melegitimasi tindakannya, BUMN dapat mengelola tekanan ini dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada informasi keuangan dan non-keuangan (Greiling et al., 2015). Namun, permasalahan kekuasaan pemangku kepentingan masih belum terungkap dalam teori legitimasi. Menurut Deegan (2000), teori pemangku kepentingan memberikan pandangan yang lebih luas untuk menganalisis hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingannya dalam hal seberapa jauh dan bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Asumsi dasar teori pemangku kepentingan menurut Freeman (1984), terdapat kontrak sosial antara organisasi dan pemangku kepentingan yang menekankan perlunya organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingannya dengan memperluas jangkauannya. Oleh sebab itu, teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan digabungkan untuk memprediksi dampak faktor-faktor penentu tertentu terhadap praktik IR di BUMN Indonesia. Harapannya, IR dapat mendukung organisasi dalam menyelaraskan tujuan dan strategi perusahaan. Dengan menggabungkan aspek berkelanjutan, IR dapat menunjukkan kepada pemangku kepentingan atas komitmennya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Penelitian-penelitian pelaporan IR sebelumnya mengutamakan pada entitas sector swasta sehingga menyisakan kesenjangan dalam literatur karena kurangnya penelitian empiris mengenai pelaporan IR di sektor publik dan faktor-faktor penentu pengungkapan tersebut. Mengikuti perspektif teoritis yang terhubung berdasarkan teori legitimasi dan pemangku kepentingan, penelitian ini memperluas pemahaman terkini tentang IR di sektor publik melalui studi longitudinal dalam konteks BUMN, sehingga berkontribusi mengisi kesenjangan penelitian (Farneti et al., 2019; Garcia-Sanchez & Noguera-Gamez, 2018; Girella et al., 2019). BUMN memainkan peran penting dalam perekonomian dunia, menghasilkan sekitar sepersepuluh produk domestik bruto dunia dan mewakili sekitar 20% nilai pasar ekuitas global (Bruton et al., 2015).

BUMN dianggap sebagai organisasi hybrid karena mencakup aspek hibriditas tertentu seperti struktur kepemilikan campuran (Argento et al., 2019), sifat tujuan organisasi yang multidimensi, sistem pendanaan campuran, dan perbedaan bentuk

pengendalian eksternal dan internal (Argento et al., 2019). Meskipun BUMN berperilaku seperti bisnis, bersaing di pasar bebas melalui model kewirausahaan, BUMN menerima dukungan finansial dan organisasi dari pemerintah untuk memenuhi tujuan publik. Oleh sebab itu, diharapkan organisasi ini dapat menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, lingkungan, dan etika (Argento et al., 2019; Garde-Sanchez et al., 2017). Selain itu, entitas tersebut juga dianggap sebagai instrumen fundamental untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mendorong penciptaan lapangan kerja (Garde-Sanchez et al., 2017).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertimbangan gabungan antara penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan terkait IR dan dilakukan dalam konteks BUMN. Pengusul memilih variabel yang paling signifikan, yang memungkinkan untuk menangkap aspek-aspek yang paling relevan dari hibriditas BUMN dan kekhasan IR.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kualitas investasi, karena akan menguntungkan organisasi jika mengungkapkan lebih banyak informasi secara strategis melalui IR (Kilic & Kuzey, 2018). Selain itu, organisasi yang menghasilkan keuntungan akan lebih banyak mengalami tekanan politik dan pengawasan publik untuk menunjukkan bahwa mereka menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan (Andrades & Larran-Jorge, 2019). Dalam mencapai tujuan komersial, BUMN harus meyakinkan pemangku kepentingan bahwa keuntungan yang diperoleh digunakan sesuai dengan tujuan penciptaan nilai sosial dan ekonomi (State-Owned Enterprises Catalysts for Public Value Creation?, 2015). Oleh karena itu, berdasarkan aspek lingkungan dan sosial, serta banyaknya pemangku kepentingan yang tertarik terlibat dalam kegiatan operasi BUMN, maka organisasi diharapkan memberikan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi melalui IR untuk mengurangi tekanan publik dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat (Andrades & Larran-Jorge, 2019; Argento et al., 2019). Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1. Profitabilitas BUMN berpengaruh positif terhadap tingkat IRD

Leverage

Sesuai dengan teori legitimasi, pemangku kepentingan terutama investor dan kreditor, memiliki ketertarikan untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat utang organisasi untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam menciptakan nilai baik jangka menengah maupun panjang dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan keuangan organisasi (Girella et al., 2019). Hal ini terutama berlaku dalam konteks BUMN yang memiliki tingkat pendanaan publik yang tinggi. Sebagai organisasi hibrid, dengan tingkat leverage yang lebih tinggi dapat meningkatkan kekhawatiran antara pemangku kepentingan baik publik maupun swasta. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan yang lebih besar dapat berfungsi sebagai pencegah, dan untuk mengurangi konflik serta mendorong keselarasan antar pemangku kepentingan (Andrades & Larran-Jorge, 2019). Sesuai dengan penjelasan tersebut, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2. Leverage BUMN berpengaruh positif terhadap tingkat IRD.

Jaminan

Menurut teori pemangku kepentingan, proses pengambilan keputusan yang efektif menyiratkan bahwa informasi non-keuangan memberikan jaminan dan keandalan yang sama seperti informasi keuangan (Goicoechea et al., 2019). Namun, seiring berjalannya waktu, kredibilitas pengungkapan non-keuangan sukarela seperti

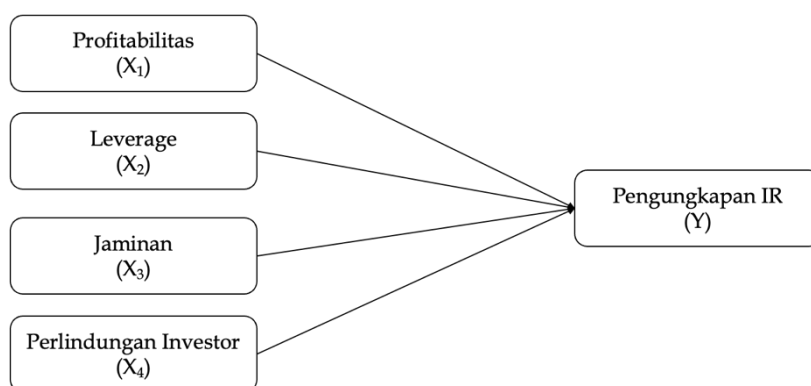
informasi yang diberikan melalui IR, dipertanyakan karena dapat digunakan untuk memanipulasi persepsi pemangku kepentingan dan membiaskan informasi negatif (Goicoechea et al., 2019; La Torre et al., 2018). Oleh karena itu, jaminan pihak ketiga dianggap penting untuk meningkatkan jangkauan, kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan melalui IR. Akhirnya, jaminan pihak ketiga dapat berdampak positif terhadap asimetri informasi dan biaya modal, serta meningkatkan legitimasi pemangku kepentingan (Kilic & Kuzey, 2018; Maroun, 2018). Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3. BUMN yang memiliki jaminan pihak ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat IRD.

Perlindungan Investor

Organisasi yang berada di wilayah dengan perlindungan investor yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi melalui IR untuk memperkuat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan pemantauan kinerja organisasi (Garcia-Sanchez & Noguera-Gamez, 2018). Penelitian sebelumnya telah memberikan bukti empiris untuk mendukung pernyataan ini (Frias-Aceituno et al., 2013; Jensen & Berg, 2012). Oleh sebab itu, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4. BUMN yang berlokasi di negara dengan perlindungan investor tinggi berpengaruh positif terhadap tingkat IRD.



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan disaring lebih lanjut dengan melakukan analisis kepemilikan yang diambil data dari Thomson Reuters EIKON Database. Untuk konsistensi, komparabilitas, dan untuk melakukan analisis longitudinal, hanya BUMN yang menyiapkan dokumen IR setiap tahun pada periode 2020-2024. Analisis konten digunakan untuk menyelidiki tingkat IRD. Pemilihan periode ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pelaporan IR di Indonesia.

Variabel Kontrol

Selain empat variabel utama, diuji pula dua variabel kontrol yang berpotensi mempengaruhi tingkat IRD, yaitu ukuran organisasi dan adopsi pedoman GRI. BUMN yang lebih besar tentu lebih terlihat oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mereka harus tunduk pada tekanan sosial dan politik yang diberikan oleh beragam pemangku kepentingan (Argento et al., 2019; Farneti et al., 2019). Selain itu, BUMN yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk menangani isu-isu lingkungan dan sosial dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil (Argento et al., 2019). Variabel kontrol kedua yaitu adopsi pedoman GRI. Sejak tahun 2000, GRI telah mengembangkan beberapa versi pedoman untuk mendukung perusahaan swasta dan publik dalam menyusun laporan keberlanjutan. Menurut survei tahun 2013 yang dilakukan oleh GRI, beberapa praktisi IR menganggap pedoman GRI sebagai “peta jalan” atau “titik referensi” sepanjang perjalanan IR mereka (Liu et al., 2019). Pedoman GRI diukur sebagai variabel dummy sebesar (1) jika organisasi mengadopsi standar GRI dan (0) jika tidak (Kilic & Kuzey, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis ini dilakukan secara manual pada sampel IR. IR akan diberi skor dan dikuantifikasi menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Zhou dkk (Zhou et al., 2017) berdasarkan delapan kategori pengungkapan. Untuk memastikan keandalan penelitian, riset ini juga memastikan terlaksananya *intercode reliability*. Untuk melakukan analisis ini, kami memberikan skor (1) jika dalam IR, BUMN mengungkapkan item tertentu yang termasuk dalam daftar pengungkapan, dan jika tidak akan diberikan skor (0). Melalui pendekatan ini, indeks IRD dihitung sebagai berikut:

$$IRD = \frac{\sum_{i=1}^m di}{m}$$

Untuk variabel lainnya, profitabilitas dihitung dari laba bersih dibagi total asset (Andrades & Larran-Jorge, 2019; Kilic & Kuzey, 2018). Leverage dihitung berdasarkan rasio total liabilitas terhadap total aset aset (Kilic & Kuzey, 2018)). Penjaminan dihitung melalui variabel biner yang diberikan kode (1) jika suatu BUMN memperoleh jaminan IR dan (0) sebaliknya (Kilic & Kuzey, 2018; Nicolò et al., 2020). Perlindungan investor dihitung pada skala antara 0 dan 10, dengan nilai yang lebih tinggi untuk perlindungan investor yang lebih besar. Perlindungan investor disamakan dengan rata-rata indeks pengungkapan, indeks tanggung jawab direktur, dan indeks kemudahan pemegang saham yang dihitung berdasarkan logaritma natural total aset (Kilic & Kuzey, 2018). Persamaan model regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$P_{i,t}^{06} = \alpha + \beta_1 EPS_{i,t} + \beta_2 BVPS_{i,t} + \beta_3 IRS + \beta_4 ROA + \beta_5 LEV + \beta_6 SIZE + \varepsilon_{i,t}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Konten

Nilai IRD rata-rata selama tiga tahun adalah sekitar 0,63 dari total 31 item yang diungkapkan oleh IR disetiap BUMN. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa tingkat

IRD secara keseluruhan telah meningkat dari waktu ke waktu dengan pengecualian tahun keuangan 2022, di mana sedikit penurunan dalam pengungkapan yang diamati. Skor rata-rata meningkat dari 0,52 pada tahun 2020 menjadi 0,68 pada tahun 2024. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan tren positif dalam IRD (Setia et al., 2015; Ahmen Haji dan Anifowose, 2016). Tabel 1 mengilustrasikan tren tingkat IRD yang dilaporkan oleh BUMN yang dijadikan sampel untuk periode 2020-2024.

Tabel 1. Hasil Konten Analisis Pengungkapan IR

Kategori Pengungkapan	2020	2021	2022	2023	2024	Total rata-rata
Organizational overview	0,84	0,88	0,94	0,80	0,87	0,87
Governance	0,72	0,81	0,65	0,79	0,75	0,74
Opportunities and risks	0,72	0,64	0,69	0,78	0,81	0,73
Strategy and resource allocation plans	0,44	0,64	0,57	0,67	0,65	0,59
Business model	0,44	0,65	0,80	0,81	0,80	0,70
Performance and outcomes	0,23	0,48	0,45	0,56	0,53	0,45
Future outlook	0,35	0,56	0,41	0,57	0,65	0,51
Other elements	0,41	0,44	0,48	0,50	0,48	0,46
Total rata-rata	0,52	0,64	0,62	0,68	0,68	0,63

Sumber : Data Primer diolah

Menurut teori pemangku kepentingan dan legitimasi, hasil IRD menunjukkan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan yang berbeda, dan menunjukkan kepatuhan terhadap kontrak sosial, BUMN memanfaatkan potensi IR dan menyediakan informasi yang terhubung. Tak hanya itu, BUMN juga menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan, seperti sumber daya tidak berwujud dan masalah lingkungan sosial yang umumnya tidak dibahas dalam laporan keuangan tradisional (García-Sánchez et al., 2013; Biondi dan Bracci, 2018; Farneti et al., 2019). Meningkatnya tingkat IRD juga memberikan bukti bahwa setiap kesediaan setiap BUMN untuk mendapatkan legitimasi organisasi dari komunitas pemangku kepentingan mereka dengan memberikan gambaran umum integrasi tentang model bisnis, strategi, dan berbagai faktor yang mendukung proses publik menciptakan nilai (Bartocci dan Picciaia, 2013; Farneti et al., 2019). IRD sangat penting untuk menunjukkan bahwa BUMN mampu beroperasi dengan memperhatikan norma sosial, nilai, dan harapan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan dan mempertahankan perilaku yang diterima secara sosial (Greiling et al., 2015; Nicolò et al., 2020).

Hasil analisis konten pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa IRD semakin diatur oleh undang-undang setiap tahunnya. Proses regulasi pelaporan non-keuangan yang dimulai di beberapa negara (misalnya Inggris, Belanda) tampaknya telah membuka jalan bagi BUMN di negara lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui IR. BUMN lebih cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan non-keuangannya untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan menghormati kontrak sosial (Bebbington et al., 2012; Chauvey et al., 2015). Selain itu, lebih dari 50% BUMN yang dijadikan sampel, sejak 2023 telah memasukkan informasi IR terkait komitmen mereka terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, praktik pelaporan SDGs melalui IR masih belum seragam. Beberapa BUMN hanya menyebutkan

kontribusi mereka terhadap satu atau dua SDGs, sedangkan yang lain memilih pendekatan yang lebih terintegrasi.

Empat kategori yang paling sering diungkapkan pada hasil analisis konten penelitian ini adalah tinjauan umum organisasi (0,87), tata kelola (0,74), peluang dan risiko (0,73), dan model bisnis (0,70). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu (Kilic dan Kuzey, 2018a; Pistoni et al., 2018; Nicolò et al., 2020). Nilai tinggi pada kategori model bisnis dan peluang risiko memberikan pandangan baru tentang bagaimana IR mengubah tingkat pengungkapan organisasi dan mencerminkan pentingnya aspek-aspek dalam IR bagi para pemangku kepentingan dan investor. Informasi dalam kategori model bisnis mendukung para pemangku kepentingan dalam penciptaan nilai BUMN dan hubungannya dengan strategi organisasi dan berbagai modal yang dimiliki (Bartocci dan Picciaia, 2013). Sedangkan informasi pada kategori peluang dan risiko berguna untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kemampuan investor untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga mendorong efisiensi dan alokasi sumber daya keuangan maupun sumber daya lainnya lebih optimal (Frias-Aceituno et al., 2013; Moolman et al., 2016). Selain itu, hal ini dapat meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Moolman et al., 2016).

Kategori yang paling jarang diungkapkan yaitu prospek masa depan (0,51), elemen lain (0,46), serta kinerja dan hasil (0,45). Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengungkap keengganan BUMN untuk memberikan informasi berwawasan ke depan yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing (Kilic dan Kuzey, 2018a; Pistoni et al., 2018). Kondisi ini juga dapat menimbulkan biaya tidak langsung dan menyebabkan dampak negatif, termasuk hilangnya posisi kompetitif (Moolman et al., 2016; Kilic dan Kuzey, 2018b). Kesulitan yang dihadapi oleh BUMN dalam memprediksi kinerja masa depan secara akurat juga muncul dari hasil analisis konten ini. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun tingkat pengungkapan secara keseluruhan lebih rendah, semua kategori ini menunjukkan tren yang positif pada tahun 2020-2024 untuk BUMN di Indonesia, yang menandakan meningkatnya kesadaran BUMN akan relevansi pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan dan investor untuk meningkatkan proses peramalan, analisis, dan pengambilan keputusan (Kilic dan Kuzey, 2018).

Hasil Pengujian Hipotesis

Statistik deksriptif dan analisis korelasi

Tabel 2 menyajikan hasil statistik deksriptif untuk variabel dependen dan independen dalam penelitian ini. Sedangkan Tabel 3 menyajikan hasil matriks korelasi Person untuk variabel dependen dan independen. Semua nilai korelasi lebih rendah dari ambang batas kritis yaitu 0,8. Hasil ini menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. Selain itu, analisis korelasi menunjukkan hubungan positif dan signifikan ($p < 0,01$) antara IRD dengan jaminan pihak ketiga dan adopsi *Global Reporting Initiative* (GRI). Analisis tersebut juga memberikan bukti adanya hubungan positif signifikan ($p < 0,01$) antara leverage dan ukuran perusahaan, serta hubungan negatif signifikan ($p < 0,05$) antara leverage dan adopsi GRI. Adopsi GRI juga berkorelasi positif ($p < 0,01$) dengan jaminan pihak ketiga. Namun, adopsi GRI berkorelasi negatif ($p < 0,05$) dengan perlindungan investor dan ukuran perusahaan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Continous Variables					
	N	Min	Max	Mean	SD
IRD	90	0,2581	0,8710	0,6265	0,1386
Profitability	90	-0,1390	0,1043	0,0135	0,0393
Leverage	90	0,1410	0,9765	0,6641	0,2290
Investor Protection	90	4,7	8,0	6,144	0,8674
Size	90	19,9251	27,9334	23,77	1,7108
Dummy Variables	2020	2021	2022	2023	2024
Assurance (y/n)	11/7	9/9	12/6	11/7	11/7
GRI adoption (y/n)	61%/39%	50%/50%	67%/33%	61%/39%	61%/39%
	12/6	15/3	14/4	15/3	15/3
	67%/33%	83%/17%	78%/22%	83%/17%	83%/17%

Sumber : Hasil olah Data dengan *EViews*

Tabel 3. Analisis Korelasi *Pearson*

Variables	1	2	3	4	5	6	7
IR disclosure index	1	-0,092	-0,103	0,362**	0,046	-0,083	0,300**
Profitability		1	-0,111	-0,070	-0,068	-0,078	0,042
Leverage			1	-0,133	0,001	0,722**	-0,260*
Assurance				1	-0,192	-0,188	0,356**
Investor protection					1	0,153	-0,276**
Size						1	-0,375**
GRI adoption							1

Notes: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$ (two-tailed)

Sumber : Hasil olah Data dengan *EViews*

Analisis regresi multivariat

Tabel 4 menunjukkan hasil model regresi data panel dengan standar error robust yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan uji Hausman dikarenakan lebih sesuai dengan model efek tetap untuk penelitian ini.

Nilai statistik Durbin-Watson sebesar 2,02 mengindikasikan tidak terjadi masalah autokorelasi, sedangkan uji kenormalan residual dan uji Jarque-Bera menunjukkan bahwa galat didistribusikan secara normal. Hasil analisis regresi multivariat menyajikan wawasan menarik tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat IRD pada BUMN Indonesia. Dua variabel kontrol, ukuran dan adopsi GRI, juga menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Namun, baik profitabilitas maupun leverage tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan IRD.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Multivariat

Variables	Coefficient	Std. Error	T-statistics	p-value	Sig.	VIF
Cost	4,94639	2,38290	2,076	0,0534	*	
Profitability	-0,150310	0,255362	-0,5886	0,5639		1,029
Leverage	0,0751366	0,299532	0,2508	0,8049		2,162
Assurance	0,0626626	0,0329852	1,900	0,0746	*	1,174
Investor protection	0,0965933	0,0204961	4,713	0,0002	***	1,134
Size	-0,213963	0,100738	-2,124	0,0486	**	2,322
GRI adoption	0,110360	0,0475258	2,322	0,0329	**	1,345
<i>Model specification and test:</i>						
R ² LSDV	0,545251	R ² inter-group		0,308813		
	2,028829	Std. Error regression		0,108567		

Durbin-Watson	90
Tot. Observation	
Test for the normality of residues: <i>t</i> -statistic: Chi-squared(2) = 1,96311, <i>p</i> -value = 0,374728 (errors are normally distributed)	
Jarque-Bera test: T-statistic: 1,95052, <i>p</i> -value = 0,377095 (residuals are normally distributed)	
Hausman test: asymptotic <i>t</i> statistic: Chi-squared(6) = 32,9426, <i>p</i> -value = 0,0000107558 (the low <i>p</i> -value indicated that fixed effects model is better than random effects to describe the model)	
Notes: * <i>p</i> < 0,1; ** <i>p</i> < 0,05; *** <i>p</i> < 0,01	

Sumber : Hasil olah Data dengan *EViews*

Dari hasil analisis uji hipotesis, profitabilitas dan leverage tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap IRD. Dengan demikian, hipotesis H1 dan H2 pada penelitian ini tidak didukung. Hubungan negatif dan tidak signifikan antara profitabilitas dan IRD sejalan dengan penelitian sebelumnya (Kilic dan Kuzey, 2018a, 2018b). Begitu juga dengan leverage, meskipun menunjukkan hasil yang positif, namun tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Lai et al., 2016; Kilic dan Kuzey, 2018b; Girella et al., 2019).

Jaminan pihak ketiga berkorelasi positif dengan IRD, yang artinya hipotesis H3 didukung sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Rivera-Arrubla et al., 2017). Sejalan dengan teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi, hubungan positif ini mengonfirmasi bahwa BUMN menjadi semakin sadar akan manfaat dari penyediaan jaminan eksternal, termasuk persepsi kualitas yang lebih tinggi, kredibilitas yang lebih tinggi, dan kegunaan informasi non-keuangan. Hasil ini mendukung argumen bahwa jaminan adalah "bagian integral dari mesin akuntabilitas" (Maroun, 2019, hlm. 1829). Untuk menghindari penilaian subjektivitas tentang informasi kualitatif dan kuantitatif yang disajikan melalui IR, tingkat pengungkapan yang memadai harus didukung oleh verifikasi eksternal untuk menghapus persepsi negatif pemangku kepentingan dalam hal manipulasi maupun greenwashing serta untuk menegakkan akuntabilitas dan legitimasi (Maroun, 2018). Dengan demikian, BUMN mampu menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dengan menyajikan informasi yang telah divalidasi oleh eksternal. Selain itu, BUMN juga bisa dianggap oleh para pemangku kepentingan mengelola efek negatif proses bisnis mereka terhadap masyarakat (Maroun, 2018).

Perlindungan investor juga berhubungan positif dan signifikan dengan IRD, hipotesis H4 didukung dan sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Jensen dan Berg, 2012; Frias-Aceituno et al., 2013). Hasil ini mengonfirmasi bahwa BUMN yang beroperasi di negara yang memastikan perlindungan investor yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi melalui IR. Hal ini dilakukan oleh BUMN untuk meningkatkan hubungannya dengan pemangku kepentingan dan mengurangi asimetri informasi sekaligus meningkatkan pemantauan kinerja BUMN (Frias-Aceituno et al., 2013; Garcia-Sanchez dan Noguera-Gamez, 2018).

Terkait variabel kontrol, menunjukkan hubungan negatif antara ukuran organisasi dengan IRD, hasil ini berbeda dari hasil sebagian besar penelitian sebelumnya yang justru menunjukkan hubungan positif antara ukuran dan IRD (Garcia-Sanchez et al., 2013; Frias-Aceituno et al., 2014; Girella et al., 2019). Hasil ini mengindikasikan bahwa aspek sosial dan politik yang berkembang pada organisasi

besar dapat berdampak negatif pada tingkat IRD yang dilaporkan oleh BUMN. Kondisi ini dapat disebabkan bahwa BUMN cenderung menghindari biaya politik dan dampak negatif lainnya, terutama dalam hal reputasi jika informasi negatif ditemukan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya (Frias-Aceituno et al., 2014; Kilic dan Kuzey, 2018), hasil analisis uji hipotesis menunjukkan hubungan positif antara adopsi GRI dengan IRD. Hasil ini menjelaskan bahwa pentingnya pedoman GRI bagi organisasi yang melaporkan IR. Sesuai dengan karakteristik umum dari *Integrated Reporting Framework* (IRF) dan pedoman GRI, organisasi yang mengadopsi pedoman GRI mungkin merasa lebih mudah untuk menyusun IR dan memberikan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi (Kilic dan Kuzey, 2018a; Liu et al., 2019). Sesuai dengan teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi, BUMN yang mengadopsi pedoman GRI dapat menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas, meningkatkan wacana legitimasi dengan lingkungan sosial tempat BUMN tersebut beroperasi (La Torre et al., 2018).

Analisis pengungkapan kepemilikan pemerintah dan pelaporan terintegrasi

Selain pengujian hipotesis, penelitian ini menyajikan analisis tambahan pada variabel kontinu yaitu kepemilikan pemerintah terhadap praktik pengungkapan IR di BUMN Indonesia. Pada tabel 5, menghasilkan korelasi positif dan signifikan ($p < 0,01$) antara kepemilikan pemerintah atas BUMN dan tingkat IRD. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi keberadaan pemegang saham publik di BUMN, semakin tinggi tingkat pengungkapan IR. Dengan demikian, kehadiran pemerintah yang lebih besar menyiratkan akuntabilitas yang lebih besar kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan sosial, dan kesejahteraan publik (Garde-Sanchez et al., 2017). Akibatnya, tingkat pengungkapan keuangan dan non-keuangan yang lebih tinggi digunakan BUMN untuk membangun legitimasi dan menghotmati kontrak sosial yang berlaku di masyarakat (Garde-Sanchez et al., 2017; Farneti et al., 2019; Tirado-Valencia et al., 2019). Tabel 5 menyajikan hasil analisis korelasi peringkat *Spearman* antara kepemilikan pemerintah atas BUMN.

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi Peringkat *Spearman*

		IRD		Gov. ownership
Spearman's Rho	IRD	Correlation coefficient	1,000	0,299**
		Sign. (two-tailed)	-	0,004
		N. Observations	90	90
	Gov. ownership	Correlation coefficient	0,299**	1,000
		Sign. (two-tailed)	0,004	-
		N. Observations	90	90

Notes: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$ (two-tailed)

Sumber : Hasil olah Data dengan *EViews*

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari tahun ke tahun, telah terjadi peningkatan pelaporan IR dalam sektor publik. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya seruan keterbukaan dan transparansi

sosial, lingkungan, dan penciptaan nilai (Biondi dan Bracci, 2018; Farneti et al., 2019). Meskipun pada awalnya pedoman ini dirancang untuk sektor swasta, pelaporan IR menjadi merambah ke BUMN yang digunakan sebagai alat untuk memberikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, IR diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi BUMN di mata para pemangku kepentingan dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan mereka yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan manajer (IIRC dan CIPFA, 2016; Farneti et al., 2019; Nicolò et al., 2020).

Minimnya penelitian IR yang membahas organisasi sektor publik, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur IR yang sudah ada. Pertama, penelitian ini menambah pengetahuan tentang pengukuran kinerja organisasi di bidang keuangan dan non-keuangan yang menganalisis hubungan antara pelaporan IR dengan BUMN di Indonesia melalui analisis longitudinal selama 2020 hingga 2024. Kedua, penelitian ini menyajikan faktor pengaruh IR yang dilaporkan oleh BUMN Indonesia, dan memperluas penggunaan variabel IR di sektor swasta dan menerapkannya pada BUMN.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas dan leverage tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan IR di BUMN Indonesia. Sedangkan jaminan pihak ketiga berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan IR. Selain itu, BUMN yang berlokasi di negara yang memiliki tingkat perlindungan investor yang lebih tinggi, cenderung memberikan lebih banyak informasi melalui IR untuk meningkatkan hubungan organisasi dengan para pemangku kepentingan, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan pemantauan kinerja mereka. Secara spesifik, penelitian ini menyajikan karakteristik BUMN yang paling menonjol, yaitu struktur kepemilikan campuran antara pemerintah dan non-pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif dan signifikan antara kepemilikan pemerintah pada IRD. Jika BUMN dimiliki mayoritas oleh pemerintah, kondisi ini digunakan untuk mendukung kepentingan publik dan kesejahteraan sosial, sehingga BUMN sangat menjaga tekanan legitimasi dan tugas akuntabilitas.

Saran

Pemahaman tentang praktik IR khususnya di BUMN yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan sangat penting dipahami oleh para penyusun standar dan praktisi. Penyusun standar diharapkan dapat menerbitkan panduan yang lebih lengkap tentang cara mengembangkan dan melaporkan IR yang ditujukan khusus untuk perusahaan sektor publik. Selain itu, regulator diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang tepat untuk meningkatkan pengungkapan di dalam buku panduan pelaporan IR. Lebih lanjut lagi, IIRC dan penyusun standar lainnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan pedoman IR yang memperhatikan relevansi kepemilikan pemerintah atas BUMN dan tugas akuntabilitas yang harus mereka jalankan. Untuk akademisi, diharapkan mampu terus mendukung BUMN untuk selalu memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan meningkatkan legitimasi organisasi. Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi pedoman bagi akademisi untuk mengadaptasi kerangka kerja yang sama untuk mengevaluasi tingkat ORD yang disediakan oleh BUMN di kawasan internasional, menguji pengaruh faktor penjelas lainnya yang mungkin akan terjadi, atau menguji

sampel yang berbeda dan membandingkannya antara praktik IRD di BUMN dengan praktik IRD di perusahaan swasta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel berjudul Pelaporan Terintegrasi oleh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia berdasarkan Analisis Longitudinal. Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada institusi peneliti yang telah menyediakan fasilitas, referensi, dan dukungan administratif selama proses penyusunan artikel. Selain itu, peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan sejawat dan keluarga atas dukungan moral, motivasi, serta doa yang tidak ternilai. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kontribusi berupa saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pelaporan terintegrasi pada BUMN di Indonesia.

REFERENSI

- Abeysekera I. A template for integrated reporting. *Journal of Intellectual Capital*. 2013;14(2):227-45.
- Ahmed Haji, A. & Anifowose, M., 2016, 'The trend of integrated reporting practice in South Africa: Ceremonial or substantive?', *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 7(2), 190-224.
- Argento D, Grossi G, Persson K, Vingren T. Explaining sustainability disclosures of hybrid organizations: the case of Swedish state-owned enterprises. *Meditari Accountancy Research*. 2019;27(4):505-33.
- Andrades J, Larran-Jorge M. Examining the amount of mandatory non-financial information disclosed by Spanish state-owned enterprises and its potential influential variables. *Meditari Accountancy Research*. 2019;27(4):534-55.
- Bartocci, L, Picciaia, F. (2013). Towards integrated reporting in the public sector. In C. Busco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, & P. Quattrone (Eds.), *Integrated reporting: Concepts and cases that redefine corporate accountability* (pp. 191-204)
- Bebbington, J., Kirk, E.A. and Larrinaga, C. (2012). The production of normativity: A comparison of reporting regimes in Spain and the UK. *Accounting, Organizations and Society*, 37(2), 78-94.
- Beck C, Dumay J, Frost G. In pursuit of a 'single source of truth': from threatened legitimacy to integrated reporting. *Journal of Business Ethics*. 2017;141(1):191-205.
- Biondi L, Bracci E. Sustainability, popular and integrated reporting in the public sector: a fad and fashion perspective. *Sustainability*. 2018;10(9):3112.
- Bruton GD, Peng MW, Ahlstrom D, Stan C, Xu K. State-owned enterprises around the world as hybrid organizations. *Academy of Management Perspectives*. 2015;29(1):92-114.

- Business Council for Sustainable Development. Public policy options to scale and accelerate business action towards vision 2050. Geneva: www.wbcsd.org/contentwbc/download/570/6329; 2012.
- Chauvey, J-N., Giordano-Spring, S., Cho, C.H. and Patten, D.M. (2015). The Normativity and Legitimacy of CSR Disclosure: Evidence from France. *Journal of Business Ethics*. 130(4), 789-803.
- Deegan C. Firms' disclosure reactions to major social incidents: Australian evidence. *Accounting Forum*. 2000;24(1):101-30.
- Dumay J, Guthrie J, Farneti F. "GRI sustainability reporting: guidelines for public and third sector organizations. *Public Management Review*. 2010;12(4):531-48.
- Farneti F, Casonato F, Montecalco M, de Villiers C. The influence of integrated reporting and stakeholder information needs on the disclosure of social information in a state- owned enterprise. *Meditari Accountancy Research*. 2019;27(4):556-79.
- Flower J. The international integrated reporting council: A story of failure. *Critical Perspectives on Accounting* [Internet]. 2015;27:1-17. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.002>
- Fonseca L, Carvalho F. The reporting of SDGs by quality, environmental, and occupational health and Safety-Certified organizations. *Sustainability*. 2019;11(20):5797-817.
- Freeman RE. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman; 1984.
- Frias-Aceituno JV, Rodríguez-Ariza L, Garcia-Sanchez IM. The role of the board in the dissemination of integrated corporate social reporting. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2013;20(4):219-33.
- Garcia-Sanchez IM, Noguera-Gamez L. Institutional investor protection pressures versus firm incentives in the disclosure of integrated reporting. *Australian Accounting Review*. 2018;28(2):199-219.
- Garde-Sanchez R, Rodríguez Bolívar MP, Lopez-Hernandez AM. Corporate and managerial characteristics as drivers of social responsibility disclosure by state-owned enterprises. *Review of Managerial Science*. 2017;11(3):633-59.
- Girella L, Zambon S, Rossi P. Reporting on sustainable development: a comparison of three italian small and medium-sized enterprises. *Corp Soc Responsib Environ Manag*. 2019;26(4):981-96.
- Goicoechea E, Gomez-Bezares F, Ugarte JV. Integrated reporting assurance: Perceptions of auditors and users in Spain. *Sustainability*. 2019;11(3):713.
- Greiling D, Traxler AA, Stötzer S. Sustainability reporting in the Austrian, german and swiss public sector. *Sustainability*. 2015;11(3):713.
- Jensen JC, Berg N. Determinants of traditional sustainability reporting versus integrated reporting. An institutionalist approach. *Bus Strategy Environ*. 2012;21(5):299-316.
- Kilic M, Kuzey C. Determinants of forward-looking disclosures in integrated reporting. *Managerial Auditing Journal*. 2018;33(1):115-44.
- Lai A, Melloni G, Stacchezzini R. Integrated reporting and narrative accountability: the role of preparers. *Bus Strategy Environ*. 2018;25(3):165-77.
- La Torre M, Sabelfeld S, Blomkvist M, Tarquinio L, Dumay J. Harmonising non-financial reporting regulation in Europe: Practical forces and projections for future research. *Meditari Accountancy Research*. 2018;26(4):598-621.

- Liu Z, Jubb C, Abhayawansa S. Analysing and evaluating integrated reporting: Insights from applying a normative benchmark. *Journal of Intellectual Capital*. 2019;20(2):235–63.
- Lutfiani A, Fatah K, Hudaya F. Voluntary disclosure with the International Integrated Reporting Council (IIRC) framework and value relevance. *Journal of Accounting and Investment*. 2024;25(1):311–27.
- Lutfiani AP, Hidayah R. ESG performance and ownership structure on cost of capital and research & development investment. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*. 2022;21(1):25–42.
- Maroun W. Modifying assurance practices to meet the needs of integrated reporting: the case for “interpretive assurance. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 2018;31(2):400–27.
- Moolman, J., Oberholzer, M., & Steyn, M. (2016). The effect of integrated reporting on integrated thinking between risk, opportunity and strategy and the disclosure of risks and opportunities. *Southern African Business Review*, 20(1), 600–627.
- Nicolò G, Zanellato G, Manes-Rossi F, Tiron-Tudor A. Corporate reporting metamorphosis: empirical findings from state-owned enterprises. *Public Money and Management*. 2020;1:1–10.
- Perego P, Kennedy S, Whiteman G. A lot of icing but little cake? taking integrated reporting forward. *J Clean Prod*. 2016;136(1):53–64.
- Pistoni A, Songini L, Bavagnoli F. Integrated reporting quality: an empirical analysis. *Corp Soc Responsib Environ Manag*. 2018;25(4):489–507.
- PWC. State-Owned enterprises catalysts for public value creation? www.pwc.com/gr/en/publications/government/state-owned-enterprises-catalysts-for-public-value-creation.html; 2015.
- Rivera-Arrubla YA, Zorio-Grima A, García-Benau MA. Integrated reports: disclosure level and explanatory factors. *Social Responsibility Journal*. 2017;13(1):155–76.
- Setia, N., Abhayawansa, S., Joshi, M. & Huynh, A.V., 2015, ‘Integrated reporting in South Africa: Some initial evidence’, *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 6(3), 397–424.
- Stacchezzini R, Florio C, Sproviero AF, Corbella S. An intellectual Capital ontology in an integrated reporting context. *Journal of Intellectual Capital*. 2019;20(1):83–99.
- Tirado-Valencia P, Cordobés-Madueño M, Ruiz-Lozano M, De Vicente-Lama M. Integrated thinking in the reporting of public sector enterprises: a proposal of contents. *Meditari Accountancy Research*. 2019;28(3):435–53.
- United Nations Industrial Development Organization. UNIDO annual report 2012. Vienna, Austria: www.unido.org/resources/publications/flagship-publications/annual-report/annual-report-2012; 2013.
- United Nations General Assembly. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. United Nations General Assembly New York: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E; 2015.
- Zhou S, Simnett R, Green W. Does integrated reporting matter to the Capital market? *Abacus*. 2017;53(1):94–132.